

**PERANAN WANITA DALAM MENUNJANG
EKONOMI KELUARGA MISKIN DIUKUR
DARI SISI PENDAPATAN**
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DITYASA HANIN FORDDANTA

NIM. C2B007016

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dityasa Hanin Forddanta
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **PERANAN WANITA DALAM MENUNJANG
EKONOMI KELUARGA MISKIN DIUKUR
DARI SISI PENDAPATAN (Studi Kasus
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)**
Dosen Pembimbing : Drs. Nugroho SBM, MSP

Semarang, 14 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. Nugroho SBM, MSP)

NIP. 19610506 198703 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dityasa Hanin Forddanta
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007016
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi
Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Maret 2012

Tim Penguji:

1. Drs. Nugroho SBM, MSP (.....)

2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)

3. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dityasa Hanin Forddanta menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Maret 2012
Yang membuat pernyataan,

(Dityasa Hanin Forddanta)
NIM C2B007016

ABSTRACT

With her capability, women has a potential recourse to handle the poverty inside her family in addition almost all the poor families in developing country are headed by women. But that potential resource is blocked by some reasons so it can expand well.

Based on this problem, this research aims to analyze the influence of women's education, analyzing the influence of time allocation and job experience to women's income. The analysis method that was used for this research is linear regression of Ordinary Least Square (OLS) from SPSS 13.0 software.

The result of this study shows: (1) the education has a significant influence to the women's income, and (2) time allocation and job experience don't have a significant influence to the women's income.

Keyword: woman role, Ordinary Least Square (OLS) model, education level, time allocation, job experience.

ABSTRAK

Dengan kemampuan yang dimilikinya wanita memiliki potensi untuk menanggulangi kemiskinan dalam keluarga apalagi kebanyakan keluarga di negara berkembang dikepalai oleh wanita. Namun potensi tersebut masih terhalang beberapa hal yang menghalangi potensi tersebut untuk berkembang.

Bedasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan wanita, alokasi waktu, dan pengalaman kerja wanita terhadap pendapatan wanita. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menggunakan *software* SPSS 13.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam menunjang pendapatan wanita, dan (2) variabel alokasi waktu dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan untuk menunjang pendapatan wanita.

Kata kunci : peran wanita, Model Ordinary Least Square (OLS), tingkat pendidikan, alokasi waktu, pengalaman kerja

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat ilmu kepada penulis. Tiada daya dan kekuatan selain dari pada-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, Sukisworo dan Anung Susana, yang selalu mendoakan, mengarahkan dan membimbing penulis tanpa kenal lelah. Aldo dan Desi, yang juga menjadi salah satu motivator penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Nugroho SBM, MSP, selaku Dosen Pembimbing atas segala kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D.
4. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku Dosen Wali atas segala arahannya selama penulis menempuh pendidikan.

5. Alfa Farah, S.E., M.Sc. yang juga membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Sahabat penulis terutama Puput, Wiwid, Okta, Oho, Anto, Ossa. Teman seperjuangan di IESP 2007, Gmni Kom.FE UNDIP, HMJ IESP UNDIP, yang telah memberikan pengalaman berharga.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, Desember 2011

Dityasa Hanin Forddanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia.....	1
1.1.2 Wanita Dalam Negara Berkembang.....	7
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
4. Sistematikan Penulisan.....	11
BAB II. TELAAH PUSTAKA.....	13
1. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Definisi dan Pengukuran Kemiskinan.....	14
2.1.2 Tingkat Pendidikan.....	14
2.1.3 Alokasi Jam Kerja.....	28
2.1.4 Pengalaman Kerja.....	34
2.1.5 Peran Wanita.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
2.4 Hipotesa Penelitian.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
3.2 Populasi dan Sampel.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis.....	48
3.5.1 Analisis Regresi Berganda.....	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	50
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.5.3 Pengujian Statistik (Goodnes of Fit).....	52
3.5.3.1 Koefisien determinasi (R^2).....	52
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan.....	53

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	54
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	55
4.2 Deskripsi Responden.....	58
4.2.1 Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	58
4.2.2 Responden Menurut Alokasi Jam Kerja.....	59
4.2.3 Responden Menurut Pengalaman Kerja.....	60
4.3 Analisis Data	61
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.3.1.1 Pengujian Multikolinearitas.....	61
4.3.1.2 Pengujian Heteroskedastisitas.....	63
4.3.1.3 Pengujian Normalitas.....	64
4.3.2 Pengujian Statistik (Goodness of Fit).....	65
4.3.2.1 Koefisien Determinasi	65
4.3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	66
4.3.2.3 Uji Parameter Individual (Uji t)	67
4.4 Pembahasan.....	67
BAB V. PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan.....	77
5.3 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Indonesia Tahun 2003-2009.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Jawa Tengah Tahun 2006-2010.....	3
Tabel 1.3 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010.....	4
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Kaliwungu Tahun 2005-2009.....	5
Tabel 1.5 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2006-2010.....	5
Tabel 1.6 Persentase Jam Kerja Kecamatan Kaliwungu Berdasarkan Gender Tahun 2004.....	9
Tabel 2.1 Pendidikan Kepala Keluarga Miskin dan Tidak Miskin.....	23
Tabel 2.2 Pendidikan Keluarga Miskin dan Tidak Miskin.....	24
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Distribusi Sampel.....	46
Tabel 4.1 Jumlah Responden Menurut Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Responden Menurut Alokasi Waktu Kecamatan Kaliwungu Tahun 2011.....	59
Tabel 4.3 Jumlah Responden Menurut Pengalaman Kerja Kecamatan Kaliwungu.....	60
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Multikolinearitas	62
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Normalitas.....	65
Tabel 4.7 Hasil Pengolahan Data.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2008.....	25
Gambar 2.2 Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan.....	26
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kaliwungu.....	56
Gambar 4.2 Diagram Luas Wilayah Kecamatan Kaliwungu.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Kuesioner
- Lampiran B Data Responden
- Lampiran C Perbandingan Pendapatan Wanita&Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Kondisi Kemiskinan Indonesia

Pada dasarnya, pembangunan terus dilakukan demi mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun proses pembangunan ini terganggu ketika krisis moneter tahun 1997 melanda Indonesia dan pada era tersebut semakin terlihat jelas jurang antara golongan miskin dan golongan kaya.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan golongan penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang memiliki pemenuhan kebutuhan minimum per orang per hari sebesar 2100 kalori atau sama dengan pendapatan perkapita per bulan yaitu Rp. 20.614,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 13.295,- perkapita per bulan untuk daerah pedesaan.

Untuk masalah kemiskinan, Indonesia sendiri menggunakan tiga penggolongan kemiskinan, yaitu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat yang hidup tepat di batas garis kemiskinan, dan yang terakhir adalah golongan masyarakat yang hidup di atas batas garis kemiskinan. Menurut Sayogya (Ichwan Muis, 2008) mengenai Batas Garis Kemiskinan itu sendiri adalah setara dengan harga 240 kg beras per orang dalam satu tahun untuk pedesaan dan 360 kg beras per orang per tahun untuk wilayah perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, batas kemiskinan dikoreksi menjadi < 240 yang dikategorikan sangat miskin, 240-320 untuk kategori miskin, dan 320-480 untuk kategori hampir berkecukupan.

Ada beberapa konsep lain seperti Batas Garis Kemiskinan menurut Bappenas yang menyatakan bahwa Batas Garis Kemiskinan itu ditentukan oleh tersedianya infrastruktur bagi masyarakat wilayah yang bersangkutan yang menghasilkan Proyek Inpres Desa Tertinggal. Kemudian, menurut World Bank (1990) definisi kemiskinan merupakan kondisi di mana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusiawinya, yaitu masalah pangan, sandang, dan papan, serta pengertian kemiskinan dari BKKBN yang mengukur kemiskinan dengan tahapan kesejahteraan keluarga.

Salah satu indikator majunya suatu pembangunan adalah dengan melihat peningkatan pendapatan perkapita yang mana pendapatan perkapita itu sendiri adalah suatu gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara dan juga merupakan hasil pembagian antara pendapatan seluruh penduduk suatu daerah dengan jumlah penduduk suatu daerah atau negara yang bersangkutan. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk yang diiringi dengan kesempatan kerja yang tinggi, pendapatan perkapita juga akan meningkat.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Indonesia Tahun 2003-2009

Tahun	Jumlah Keluarga Prasejahtera (kk)	Jumlah Keluarga Sejahtera I (kk)
2003	11.913.869	14.797.788
2004	11.870.204	15.238.243
2005	13.326.683	15.238.243
2006	13.326.683	13.413.562
2007	13.479.039	13.387.570
2008	13.547.651	13.758.879
2009	13.571.611	14.391.993

Sumber: Situs resmi BAPPENAS, 2012

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap pertama di Indonesia antara tahun 2003 hingga 2009. Pendataan keluarga selama periode 2003 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap pertama mengalami peningkatan, yaitu keluarga prasejahtera dari sebesar 11.913.869 keluarga pada tahun 2003 menjadi 13.571.611 keluarga pada tahun 2009. Kemudian untuk keluarga sejahtera tahap pertama mengalami perubahan dari sebesar 14.797.788 keluarga pada tahun 2003 menjadi sebesar 14.391.993 pada tahun 2009. Secara umum, jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tahap pertama masing-masing mengalami peningkatan meskipun pada tahun-tahun tertentu sedikit berfluktuasi.

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010

Tahun	Jumlah Keluarga Prasejahtera (kk)	Jumlah Keluarga Sejahtera I (kk)
2006	3.198.596	1.768.473
2007	3.138.808	1.709.963
2008	3.095.490	1.745.308
2009	2.997.410	1.813.395
2010	2.908.390	1.855.649

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga berdasarkan tahapan kesejahteraan Propinsi Jawa Tengah mengalami perubahan yang cukup positif. Secara umum jumlah keluarga prasejahtera mengalami penurunan dimulai dari sebesar 3.198.596 keluarga pada tahun 2006 menjadi 2.908.390 keluarga pada tahun 2010. Hal serupa juga terjadi untuk keluarga sejahtera tahap pertama meskipun sedikit terjadi penurunan pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing

sebesar 1.768.473 keluarga menjadi 1.70.963. Untuk tahun-tahun berikutnya keluarga sejahtera tahap pertama terus mengalami peningkatan hingga 1.855.409 keluarga pada tahun 2010.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Kendal lebih mendominasi dibandingkan dengan keluarga sejahtera tahap pertama. Meskipun demikian, jumlah keluarga prasejahtera terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 123.439 keluarga berada dalam kriteria keluarga prasejahtera dan terus mengalami penurunan hingga 109.796 keluarga pada tahun 2010. Untuk keluarga sejahtera tahap pertama juga umum terus meningkat mulai dari tahun 2006 sebesar 35.332 keluarga menjadi 40.553 keluarga ditahun 2009 dan kembali turun pada tahun 2010 menjadi 39.732 keluarga.

Tabel 1.3 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010

Tahun	Jumlah Keluarga Prasejahtera (keluarga)	Jumlah Keluarga Sejahtera I (keluarga)
2006	123.439	35.332
2007	115.470	38.821
2008	115.629	38.457
2009	111.910	40.553
2010	109.796	39.732

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012

Tabel 1.4 memberikan informasi mengenai jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu dari Tahun 2006 hingga tahun 2009. Selama periode tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk. Tercatat pada tahun 2006 sebanyak 52.489 jiwa menjadi 53.829 jiwa pada tahun 2009.

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Kaliwungu
Tahun 2005-2009**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2005	91.515
2006	52.489
2007	53.397
2008	53.646
2009	53.829

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2011

Dari Tabel 1.5, dapat dilihat bahwa keluarga prasejahtera di Kecamatan Kaliwungu tercatat paling tinggi pada tahun 2010 sebesar 4.082 keluarga sedangkan angka terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 3.621 keluarga. Untuk keluarga sejahtera tahap pertama di Kecamatan Kaliwungu sendiri cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2006 sebesar 2.286 keluarga menjadi 2.407 pada tahun 2010.

**Tabel 1.5 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan
Kecamatan Kaliwungu Tahun 2006 – 2010**

Tahun	Jumlah Keluarga Prasejahtera (keluarga)	Jumlah Keluarga Sejahtera I (keluarga)
2006	3.621	2.286
2007	3.915	2.260
2008	3.918	2.292
2009	3.659	2.314
2010	4.082	2.407

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2012

Baik di tingkat propinsi, kabupaten, maupun kecamatan, kenyataannya jumlah penduduk keluarga prasejahtera masih lebih banyak dibandingkan dengan keluarga sejahtera tahap pertama. Dengan kondisi demikian yang dialami, maka

hal tersebut menyebabkan keadaan yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan akibatnya akan menimbulkan masalah yang mengakar pada keluarga tersebut.

Dalam berbagai kasus terutama di negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Banyak keluarga miskin yang meskipun sudah berjuang keras untuk keluar melewati Batas Garis Kemiskinan tetapi tetap saja tidak berhasil. Ditambah lagi dengan tingginya tingkat fertilitas karena keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lemah memiliki asumsi bahwa dengan banyaknya anak yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga. Pilihan atau dalam ilmu ekonomi dinamakan *Opportunity cost* yang harus diambil adalah ketika membiarkan anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi supaya dapat segera bekerja dan lebih cepat menghasilkan uang (meskipun pada umumnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pendapatan bagi seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi). Dengan pendidikan yang rendah mengakibatkan eliminasi bagi seseorang di masa mendatang. Yang bersangkutan akan kesulitan untuk memenangi persaingan dalam dunia kerja yang memang pada kenyataannya sebagian besar lapangan kerja saat ini khususnya yang bergerak disektor formal melakukan penawaran lapangan kerja dengan kriteria pendidikan tertentu sehingga pada akhirnya pendapatan yang diterima untuk keluarga akan tetap rendah. Kondisi yang tidak jauh berbeda ini bisa terus berulang hingga ke generasi keluarga di masa yang akan datang dan pada akhirnya kondisi yang tidak jauh berbeda akan terus terulang.

1.1.2 Wanita Dalam Negara Berkembang

Di negara-negara dunia ketiga, masyarakat yang hidup di dalam lingkaran kemiskinan adalah masyarakat yang hidup di dalam keluarga yang dikepalai oleh wanita, karena dalam keluarga tersebut tidak ada pria yang mampu menafkahi keluarganya (Todaro & Smith, 2006).

Kondisi demikian juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan yang kemudian membentuk sebuah program yang melindungi hak-hak para wanita yaitu PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Data Susenas Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 ketika PEKKA pertama digagas yang kurang dari 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Selain itu, nilai social budaya umumnya juga masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya (PEKKA, 2010).

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini

sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (Pekka) yang rendah. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa Pekka umumnya berusia antara 20 – 60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Sebagian wanita menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari.

Sebagian wanita mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah termasuk pembatasan hak-hak wanita dalam kegiatan ekonominya. Terlepas dari semua kondisi kehidupan wanita yang memprihatinkan, wanita khususnya yang hidup di negara berkembang sebenarnya memiliki peran tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Berdasarkan beberapa bukti empiris, tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investasi pendidikan kaum wanita lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum pria. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dapat memberikan produktivitas kerja yang lebih tinggi dibanding kaum pria. Bahkan dengan pendidikan wanita yang lebih tinggi, untuk jangka panjang wanita tersebut dapat menjamin kualitas intelegensi anak – anaknya sehingga berguna untuk masa depan, dapat mengurangi tingkat fertilitas karena pada umumnya wanita yang bekerja menunda untuk menikah muda sehingga momentum ledakan penduduk dapat dikurangi. Apalagi jika dilengkapi dengan efektifnya program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui ibu-ibu PKK dan program-program simpan pinjam khusus untuk wanita.

Dalam dunia kerja, saat ini semakin banyak wanita yang berpartisipasi

dalam dunia kerja (ekonomi). Akan tetapi, tren ini hanya umum dijumpai di kota-kota besar saja, sedangkan untuk di daerah pedesaan, seperti di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal misalnya, partisipasi kerja masih didominasi oleh kaum pria, apalagi jika melihat jumlah jam kerja dalam sehari. Apabila dilihat ke sisi jam kerja perhari, maka masih kaum pria yang memiliki jam kerja yang lebih banyak dibanding kaum wanita.

Tabel 1.6 Persentase Jam Kerja Kecamatan Kaliwungu Berdasarkan Gender, Tahun 2004

Presentase Jam Kerja (jam per minggu)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)
00 – 24	42,5	21,6
25 – 34	15,9	15,6
35 – 44	16,3	21,4
45 – 59	16,9	32,3
60 jam ke atas	8,3	8,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2004

Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, untuk jam kerja 00 – 24 jam didominasi oleh kaum wanita dengan persentase sebesar 42,5%. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki yang hanya sebesar 21,6%. Akan tetapi, jumlah jam kerja diatas 24 jam didominasi oleh kaum pria terutama untuk kategori 45 – 59 jam per minggu yaitu sebesar 32,3 % sehingga secara umum laki-laki memiliki jam kerja yang lebih banyak. Meskipun demikian, kaum wanita sebenarnya memiliki jam kerja yang lebih panjang dibanding kaum pria, hanya saja jam kerja kaum wanita tidak berada dalam kegiatan ekonomi. Wanita cenderung berada dalam kegiatan mengurus rumah tangga sehingga dengan melihat hal ini, secara singkat kaum wanita dapat menunjang

perekonomian keluarga miskin apabila mereka memiliki waktu kerja paling tidak sama dengan kaum pria, dengan catatan pekerjaan mengurus rumah tangga harus dibagi secara adil kepada kaum pria dan kaum wanita.

Keputusan wanita atau istri untuk bekerja membawa konsekuensi dan tanggung jawab rangkap sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja khususnya menyangkut pembagian waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah, disamping itu berapa pendapatan yang diperoleh dan dipergunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga adalah masalah yang melatar belakangi penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dengan segala keterbatasan yang ada, wanita tetap memiliki potensi untuk menambah pendapatan keluarga melalui pendapatan wanita itu sendiri, sehingga dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran wanita, khususnya para istri dalam memenuhi kebutuhan hidup pada keluarga, apakah dia bekerja atau tidak di daerah penelitian.
- b. Apakah pendidikan dan pengalaman kerja wanita berpengaruh pada pendapatan. Apabila berpengaruh maka seberapa besar pengaruhnya dan seberapa besar sumbangannya atas hasil bekerjanya bagi keluarga di daerah penelitian.
- c. Memperoleh informasi bagaimana para wanita (istri) mengalokasikan waktu bekerja sehingga mempengaruhi pendapatan yang didapat.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

- a. Menganalisis seberapa besar peran wanita (istri) dalam menambah pendapatan keluarga.
- b. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan wanita, alokasi waktu kerja wanita dan pengalaman kerja wanita terhadap pendapatan wanita yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang diambil data penelitian yang akan dikemukakan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta beberapa saran yang membangun pihak-pihak terkait dalam masalah peran wanita dalam menanggulangi kemiskinan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Segmen masyarakat termiskin di Dunia Ketiga hidup dalam rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Potensi wanita dalam membuat pendapatan sendiri juga jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh pria sehingga wanita dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Pada umumnya, para wanita yang ada didalam rumah tangga yang dikepalai seorang wanita memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Disamping beban berat yang harus ditanggung para wanita tersebut karena menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan per kapita.

Sebagian dari disparitas atau kesenjangan pendapatan antara keluarga-keluarga yang dikepalai oleh pria dan wanita itu bersumber dari adanya perbedaan pendapatan yang sangat besar antara pria dan wanita. Selain upah buruh wanita biasanya lebih rendah (meskipun porsi dan beban kerjanya sama), wanita juga sulit mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi. Wanita hanya bisa bekerja dibidang kerja yang berpenghasilan rendah atau berproduktivitas rendah, bahkan yang ilegal. Artinya, wanita terpaksa bekerja di sektor tertentu, misalnya saja di sektor garmen, yang belum menerapkan regulasi dan ketentuan upah minimum atau berbagai peraturan perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan tunjangan sosial serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai

kepada para pekerjanya. Di pedesaan situasinya sama sekali tidak jauh lebih baik. Kaum wanita di situ juga sulit mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan secara tetap dan proporsional dan sering menjadi bahan pokok pembahasan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk menyelaraskan pendapatan potensial, tetapi seringkali peraturan tersebut justru menghalangi kaum wanita untuk masuk ke dalam dunia kerja yang ada (Todaro & Smith, 2006)

2.1.1 Definisi dan Pengukuran Kemiskinan

David Cox (Ade Cahyat, 2004) menyatakan bahwa kemiskinan tidak berputar pada satu titik saja melainkan berada dalam beberapa dimensi. Ada kemiskinan yang diakibatkan oleh era globalisasi yang mana era tersebut menyebabkan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pada umumnya yang menang adalah negara maju sedangkan negara berkembang semakin terpinggirkan. Kemudian, ada kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan seperti kemiskinan subsisten atau kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan, kemiskinan pedesaan yang terjadi justru karena efek samping dari laju pembangunan sehingga daerah pedesaan semakin terpinggirkan, dan kemiskinan perkotaan yang sudah menjadi hakekat dari akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian eksternal seperti bencana alam, tingginya jumlah penduduk, serta konflik dinamakan kemiskinan konsekuensial. Terakhir, kemiskinan yang paling kasat mata adalah kemiskinan sosial yang dialami oleh kelompok minoritas, anak-anak, dan kaum perempuan.

Kemiskinan tidak bisa dianggap sama untuk setiap wilayah atau daerah kerana permasalahan kemiskinan itu sangat luas dan berbeda untuk setiap daerah baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Perbedaan-perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, keadaan alam, kebiasaan daerah atau wilayah setempat apalagi jika berkaitan dengan persepsi kemiskinan itu sendiri. Misalnya, persepsi kemiskinan untuk masyarakat Jawa akan berbeda dengan persepsi kemiskinan menurut masyarakat Kalimantan dan akan berbeda pula dengan masyarakat Sulawesi serta begitu pula seterusnya. Perbedaan persepsi ini pada akhirnya akan mempengaruhi konsep kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar secara manusiawi (Butsarman) yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Ukuran kecukupan terhadap pemenuhan kebutuhan setiap aspek Butsarman itu sendiri pun juga berbeda antara masyarakat di daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga dengan daerah perkotaan dan pedesaan dan seterusnya.

Secara umum, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif itu menyangkut perasaan dalam diri perorangan atau sebuah rumah tangga dan berdasarkan persepsi keadaan diri atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan rohaniah atau batiniah. Dengan kata lain, kemiskinan relatif dilatarbelakangi oleh adat, kebiasaan maupun budaya dan pola hidup serta individu-individu yang bersangkutan, dan oleh karena itu pengukuran untuk kemiskinan relatif sangat sulit untuk dilakukan.

Kemiskinan absolut merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi

kebutuhan jasmani berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi.

Dalam penelitian ini, dijelaskan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pada khususnya masyarakat daerah penelitian, menyangkut masalah kemiskinan dengan mengacu pada pengertian kemiskinan dari BKKBN. Seperti diketahui, pengertian kemiskinan sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan diantara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Masing-masing pihak baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para peneliti memiliki perspektif dan pengertian yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Meskipun demikian, kriteria kemiskinan di negara kita pada umumnya dapat mengacu pada penghitungan jumlah penduduk miskin oleh BPS dan sistem pendataan keluarga miskin oleh BKKBN. Secara umum metode pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan tiga konsep, yaitu berdasarkan: 1) garis kemiskinan pendapatan (*income-based poverty line*), 2) garis kemiskinan konsumsi (*consumption-based poverty line*), dan 3) karakteristik penduduk atau rumahtangga miskin. Ketiga konsep pengertian kemiskinan tersebut dijelaskan seperti berikut.

Garis Kemiskinan Pendapatan (*income-based poverty line*) merupakan konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan. Mereka yang dikategorikan dalam kemiskinan adalah individu, rumah tangga, masyarakat atau kelompok sosial yang memperoleh pendapatan standar minimal. Salah satu contoh penggunaan konsep ini adalah penetapan batas \$1 perkapita perhari sebagai batas kemiskinan sebagai indikator dalam *Goal 1* :

Millenium Development Goal's (United Nations, 2000).

Konsep ini memiliki beberapa kelemahan seperti menyamaratakan daya beli masyarakat, padahal tingkat harga barang dan jasa berbeda-beda dalam wilayah perkotaan dan pedesaan serta daerah terpencil dengan daerah tidak terpencil. Kelemahan berikutnya adalah bahwa konsep ini memiliki konsep pendapatan yang statis, dengan kata lain orang yang dianggap miskin adalah orang yang melakukan konsumsi di bawah \$1, padahal bisa saja orang tersebut melakukan konsumsi di atas \$1 dengan cara melakukan pinjaman dan menggantinya di masa yang akan datang. Kelemahan yang terakhir adalah hasil survey yang tidak akurat karena pada umumnya pendapatan dilaporkan lebih rendah dalam survey. Hal ini disebabkan karena responden lupa akan jumlah penghasilannya, karena enggan atau malu, serta kadang pendapatan tersebut sulit untuk diamati (terutama dalam usaha pertanian).

Konsep kedua adalah pendekatan garis kemiskinan pengeluaran/konsumsi. Konsep ini merupakan konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk menghitung penduduk miskin di Indonesia. Konsep ini menggunakan konsep kemiskinan yang dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang/rumahtangga. Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung “garis kemiskinan konsumsi” untuk kemudian dapat dihitung persentase penduduk

miskin (*Head Count Index*). *Head Count Index* adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi itu sendiri dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit diatas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

Batas kecukupan konsumsi makanan adalah batas kecukupan konsumsi makanan yang dihitung dari banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Wydia Pangan dan Gizi (1978). Semenjak tahun 1993 penghitungan kecukupan kalori didasarkan pada 52 komoditi makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi, hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) tahun 1993 dan 1996.

Batas kecukupan konsumsi non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum non-makanan, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar non-makanan lainnya. Pemilihan jenis konsumsi non-makanan mengalami perkembangan dari satu periode ke periode lainnya. Pada periode sebelum tahun 1993, jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri dari 14 jenis untuk perkotaan dan 12 jenis untuk pedesaan; sedangkan pada periode sejak tahun 1996 (Hasil SPKKD, 1996), jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih

terdiri dari 51 jenis untuk perkotaan dan 47 jenis untuk perdesaan.

Dalam konsep garis kemiskinan pengeluaran/konsumsi ini menggunakan dua jenis pengukuran indeks, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Artinya, indeks ini merupakan indikator yang baik tentang kedalaman kemiskinan dan melalui indeks kedalaman kemiskinan inilah dapat diperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi ukuran ini masih belum realistis karena Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) belum mempertimbangkan biaya operasional dan faktor penghambat. Meskipun demikian, ukuran tersebut memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan. Sebagai ukuran pengentasan kemiskinan, indeks ini sebenarnya cukup memadai karena transfer dana kemiskinan dilakukan dengan target sasaran yang sempurna. Namun indeks ini masih memiliki kelemahan karena mengabaikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) digunakan untuk memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan mengkuadratkan poverty gap, indeks ini secara tidak langsung memberikan masukan yang lebih pada unit observasi yang semakin jatuh di

bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kelemahan dari konsep Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi adalah bahwa perlu diketahui pendekatan BPS dalam pengukuran kemiskinan memang telah mengikuti ketentuan pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara luas di negara lain, tetapi pengukuran ini hanya sebatas pada aspek ekonominya yaitu konsep daya beli melalui pengeluaran/konsumsi rumah tangga dalam rupiah yang tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk wilayah kabupaten. Selain itu, penghitungan kemiskinan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali melalui Susenas modul konsumsi, dimaksudkan hanya untuk menghasilkan jumlah penduduk miskin miskin agregat untuk tingkat nasional dan propinsi. Walaupun BPS, dengan menggunakan data kor Susenas (berdasarkan data pengeluaran rumahtangga per kelompok konsumsi) melakukan penghitungan penduduk miskin untuk kabupaten/kota, tetapi penghitungan tersebut masih dalam struktur garis kemiskinan yang dikaitkan dengan pola konsumsi penduduk miskin propinsi dan didasarkan pada subsample Susenas yang lebih kecil (modul konsumsi) yang hanya mewakili tingkat propinsi. Untuk masalah budaya lokal dan faktor-faktor non-ekonomi dalam konsep ini hanya diasumsikan secara agregatif untuk tingkat propinsi. Faktor komposisi dalam rumah tangga hanya berdasarkan pada jumlah anggota rumah tangga, padahal di dalam rumah tangga itu sendiri banyak variasi sampel mulai dari umur, jenis kelamin dan pekerjaan.

Permasalahan lain dari pengukuran berdasarkan perhitungan basic needs ini adalah bahwa pengukuran atau konsep ini hanya bersifat makro. Artinya,

pengukuran ini hanya berdasarkan pada sampel rumah tangga. Konsep ini pada dasarnya sangat bermanfaat untuk memberikan acuan atas alokasi anggaran pengentasan kemiskinan, tetap sayangnya tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung untuk mengetahui penduduk miskin di lapangan. Selain itu, konsep ini menggunakan asumsi model keluarga inti (*nuclear family*) sebagai pengambil keputusan dalam transaksi ekonomi. Akibatnya, konsep ini juga tidak bisa berlaku secara umum untuk daerah lain karena perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sangat sensitif.

Konsep terakhir adalah Konsep Karakteristik Rumah Tangga. Pendekatan BKKBN dalam konsep ini didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam 5 (lima) tahapan, yaitu “keluarga prasejahtera”, “keluarga sejahtera tahap I”, “keluarga sejahtera tahap II”, “keluarga sejahtera tahap III”, dan “keluarga sejahtera tahap III plus”. Sedangkan keluarga miskin adalah keluarga-keluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus) adalah “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I”. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi lima indikator berikut:

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi beberapa indikator, yaitu setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing-masing, pada umumnya masing-masing anggota keluarga makan dalam sehari sebanyak dua kali atau lebih, semua anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda-beda untuk sekolah, bekerja, atau bepergian, bagian terluas lantai di rumah terbuat dari keramik atau tegel dan bukan dari tanah, serta yang terakhir adalah apabila anggota keluarga ada yang

sakit atau ada pasangan usia muda yang ingin mengikuti Program KB, maka mereka akan datang ke petugas kesehatan dan diberi cara KB yang modern. keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi salah satu kriteria dari keluarga sejahtera tahap I.

Konsep Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I sifatnya normatif dan hanya cocok untuk keluarga kecil/keluarga inti dan tidak cocok untuk di daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya masih menganut sistem kekerabatan keluarga.

Indikator-indikator BKKBN yang mengobservasi karakteristik sosial ekonomi, seperti frekwensi makan anggota keluarga dalam sehari, pemilihan pakaian yang berbeda-beda tersedia untuk individu dalam setiap kegiatan yang berbeda (dirumah, bekerja, sekolah, dan bepergian), kondisi lantai rumah (tanah, kayu, semen), perilaku keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan bahkan perilaku anggota keluarga melaksanakan aktifitas keagamaan sebagai pre-kondisi dari keinginan untuk memberikan harta seseorang untuk yang memerlukan semuanya didasarkan norma keluarga kecil (*nuclear family*) dan sejahtera tanpa memperhatikan tekanan untuk saling membantu diantara jaringan keturunan dan tetangga (Ritonga Homotangan, 2001).

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Seperti yang telah dapat diperkirakan, lama bersekolah kepala rumah tangga miskin berada jauh di bawah lama bersekolah kepala rumah tangga tidak miskin. Rata-rata lama bersekolah dari kepala keluarga kelompok miskin hanyalah

sebesar 5,5 tahun di daerah perkotaan dan 4,35 tahun di daerah pedesaan. Lama bersekolah ini berkorelasi kuat dengan kesempatan menciptakan pendapatan (Bambang Widianto, 2010). Pendidikan yang tidak sampai menamatkan sekolah dasar ini sangat menyulitkan rumah tangga miskin keluar dari kemiskinannya (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Pendidikan Keluarga Miskin dan Tidak Miskin

Rata-rata Lama Bersekolah Kepala Rumah Tangga	Miskin (tahun)		Tidak Miskin (tahun)	
	2006	2009	2006	2009
- Perkotaan (K)	5,42	5,50	8,73	9,10
- Pedesaan (D)	4,18	4,35	5,49	6,05
- Perkotaan+Pedesaan (K+D)	4,63	4,77	7,06	7,59

Sumber: Susenas Panel, Maret 2006 dan Maret 2009, BPS

Dalam hal pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala keluarga, mayoritas rumah tangga miskin, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan memiliki kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah (Tabel 2.2). Sekitar 80,5 persen rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga yang tingkat pendidikannya tidak tamat atau hanya tamat SD. Dapat dibayangkan memang bahwa rumah tangga ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, ada sekitar 19 persen dari rumah tangga miskin yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan sekolah lanjutan pertama atau atas. Yang cukup mengkhawatirkan adalah masih ada pula rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi.

Data Tabel 2.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga akan semakin memperkecil kemungkinan rumah

tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Hal lain yang cukup menarik dapat dilihat pada kecilnya perbedaan tingkat pendidikan menengah (khususnya SLTP)

Tabel 2.2 Pendidikan Keluarga Miskin dan Tidak Miskin

	Tidak (%)	SD (%)	SLTP (%)	SLTA (%)	Perguruan (%)
Rumah tangga miskin					
-Perkotaan (K)	34,48	36,97	14,94	13,56	0,55
-Pedesaan (D)	43,38	41,52	9,41	5,27	0,42
-Perkotaan + Pedesaan (K+D)	40,51	39,89	11,2	7,94	0,46
Rumah tangga tidak miskin					
-Perkotaan (K)	14,19	22,94	16	33,93	12,94
-Pedesaan (D)	31,87	37,93	13,32	13,27	3,6
-Perkotaan + Pedesaan (K+D)	23,85	31,13	14,54	22,64	7,84

Sumber : Susenas Panel, Maret 2006 dan Maret 2009, BPS.

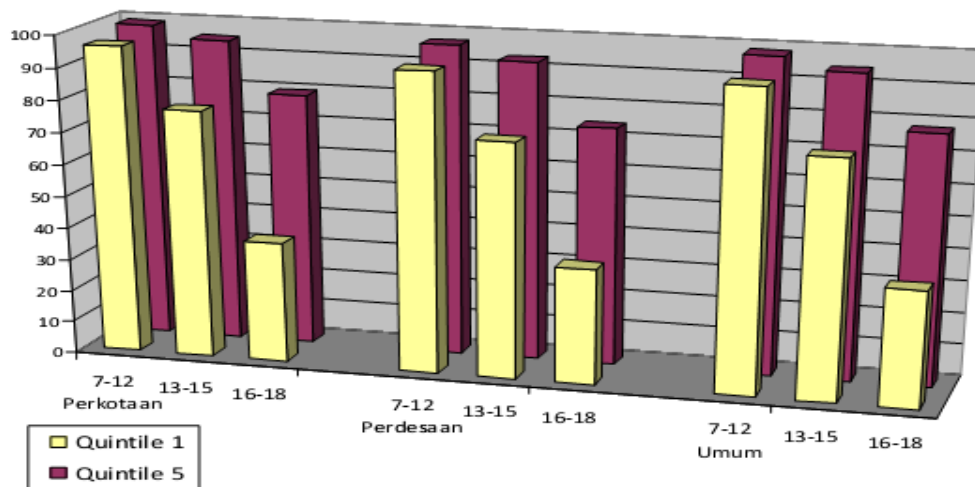
pada kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin, yang mengindikasikan adanya pengaruh pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun, walaupun belum mampu membebaskan rumah tangga miskin dari kemiskinan

Di sisi lain, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara rata-rata bersekolah anggota keluarga miskin dan keluarga tidak miskin. Di daerah perkotaan di tahun 2009, beda rata-rata tersebut memang tercatat sebesar 3,6 tahun. Namun di daerah pedesaan perbedaannya hanya 1,7 tahun. Perbedaan sedemikian tidak menjadikan kelompok tidak miskin berada di luar kemiskinan secara permanen. Kelompok tidak miskin sekalipun, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, sangat mungkin menjadi miskin terutama jika terjadi gangguan eksternal seperti sakit keras, peningkatan harga, bencana alam, dan lainnya.

Pendidikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak saja harus dipahami sebagai pendidikan orang tua (yaitu kepala keluarga miskin). Lebih dari

itu, pendidikan harus diperhatikan pula bagi anak dari keluarga miskin. Anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pendidikan yang memadai akan memiliki kesempatan yang lebih baik keluar dari status miskin di masa depan.

Gambar 2.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2008



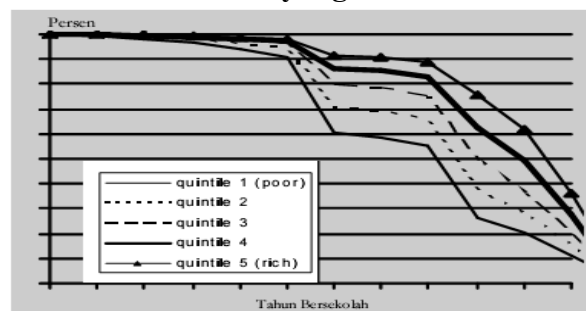
Sumber : Susenas Kor, Juli 2008, BPS.

Gambar 2.1 menunjukkan angka partisipasi sekolah (school enrollment) dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga termiskin (Q1), baik di perkotaan maupun pedesaan, jumlahnya masih jauh di bawah rumah tangga terkaya (Q5). Secara umum, anak-anak kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari golongan pendapatan termiskin (Q1) di pedesaan mampu menyamai kemampuan mengakses pendidikan pada kelompok usia yang sama di perkotaan. Hal ini tidak lepas dari program wajib belajar 9 tahun yang digencarkan oleh Pemerintah. Tetapi, untuk anak-anak kelompok usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga termiskin (Q1) di pedesaan tidak mencapai separuh dari jumlah anak-anak kelompok usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga terkaya (Q5) di

pedesaan. Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena ketiadaan biaya bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal lain yang mungkin terjadi adalah desakan ekonomi bagi mereka untuk merasa cukup dengan pendidikan tertingginya dan kemudian mencari pekerjaan/nafkah guna perbaikan kesejahteraan keluarga.

Rumah tangga miskin memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan. Selain dicerminkan oleh angka partisipasi, hal tersebut juga dicerminkan oleh tingkat putus sekolah. Angka putus sekolah untuk anak-anak umur 7-12 tahun dari rumah tangga miskin di tahun 2009 tercatat sebesar 1,72 persen; dan hal ini hampir lebih dari dua kali lipat dari angka putus sekolah untuk kelompok umur yang sama bagi keluarga tidak miskin yaitu sebesar 0,79 persen. Untuk kelompok umur 13-15 tahun, perbedaan angka putus sekolah untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan tidak miskin ini ternyata lebih tinggi lagi. Di tahun 2009, angka putus sekolah anak-anak umur 13-15 tahun dari rumah tangga miskin tercatat sebesar 20,31 persen, sementara untuk rumah tangga tidak miskin tercatat sebesar 9,31 persen.

Gambar 2.2. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber : Susenas 2004

Lebih jauh lagi, anak-anak dari rumah tangga miskin juga memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. Anak-anak dari rumah tangga miskin biasanya sedikit sekali yang melanjutkan ke SLTP. Hal ini dapat diilustrasikan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2.

Persentase anak usia 16-18 tahun menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. Ketika sumbu datar mencerminkan lamanya tahun bersekolah, maka gambar di atas dapat dipersepsikan seolah-olah sebagai suatu proses bersekolah. Terlihat bahwa di enam tahun pertama bersekolah, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar di antara kelompok pendapatan rumah tangga. Pada tahun ke-6, seorang anak lulus SD. Tahun sekolah ke-7 adalah SLTP. Di sini mulai terlihat perbedaan persentase di antara kelompok pendapatan. Kelompok rumah tangga miskin (Q1) memiliki kemampuan melanjutkan yang sangat signifikan berbeda dibandingkan kelompok rumah tangga kaya (misalnya Q1). Hal yang sama terjadi untuk melanjutkan ke SLTA dan Perguruan Tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memang memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin dalam menjaga angka partisipasi, putus sekolah, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, ketiga hal ini merupakan kunci dari penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan harapan agar anak dari keluarga miskin pada saatnya nanti tidak akan meneruskan status miskin keluarganya saat ini. Rendahnya akses pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin membuat mereka nantinya sulit bersaing di pasar kerja dan terpaksa memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah, dan besar kemungkinan keluarga

tersebut pun akan bergelut dengan kemiskinan. Dengan kata lain, akses yang rendah pada pendidikan membuat kemiskinan diwariskan ke generasi berikutnya.

2.1.3 Alokasi Jam Kerja

Alokasi jam kerja pada umumnya mempengaruhi tingkat pendapatan khususnya bagi para wanita itu sendiri. Secara umum, makin tinggi jam kerja maka makin tinggi pula pendapatan yang diterima, misalnya seorang pegawai negeri atau swasta yang memilih untuk lembur maka orang tersebut akan mendapatkan upah lembur atau bonus yang lebih banyak. Alokasi jam kerja ini memiliki hubungan erat dengan lingkup pengangguran (Rosmiyati Hodijah Saleh, 1993).

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

I. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Pengangguran konjungtural (*Cycle Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
- b. Pengangguran struktural (*Struktural Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
 - ◆ Akibat permintaan berkurang
 - ◆ Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi
 - ◆ Akibat kebijakan pemerintah
- c. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara

pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

- d. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
- e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin
- f. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

II. Penyebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia
5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

III. Dampak-dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian perlu dikelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu:

- a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan

pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan

ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

- Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

b. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat.

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
- Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
- Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik.

2.1.3 Pengalaman Kerja

Sampai saat ini belum ada teori pasti yang mengemukakan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap proporsi kerja seseorang, namun diperkirakan bahwa dengan pengalaman kerja pencari kerja lebih sanggup untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dengan memiliki pengalaman kerja didukung tingkat pendidikan yang tinggi, maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurut Sudarsono (2001) dalam penelitian Anik Mulyawati (2008) yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Motivasi Kerja karyawan di Bagian Spinning Pada PT Hanil Indonesia menyebutkan bahwa dalam hal penerimaan karyawan, pihak perusahaan harus benar - benar jeli dalam melaksanakan seleksi kepada para karyawan yang akan diterima dan dipekerjakan di perusahaannya, karena dalam organisasi perusahaan, manusia merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi. Sebuah perusahaan yang menjadikan sedemikian sebagaimana tenaga yang potensial, dibutuhkan syarat - syarat tertentu yang harus dimiliki oleh para karyawannya bahkan dalam hal penerimaan karyawan diperlukan ketelitian dalam hal penyeleksian karyawan barunya. Setiap perusahaan dalam melakukan aktivitasnya pasti memiliki tujuan - tujuan tertentu yang hendak dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut setiap perusahaan harus pandai dalam memilih strategi yang utamanya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia, pada intinya terfokus pada langkah - langkah tertentu yang diambil oleh manajer atas tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Dalam penerimaan karyawan,

kualifikasi pekerja yang dibutuhkan untuk memangku suatu jabatan, seperti pendidikan, pengalaman, ketrampilan yang harus dimiliki.

Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang luas dan didukung dengan pengalaman kerja yang dimilikinya, sehingga seorang karyawan sudah memiliki nilai plus dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dapat dipahami bahwa dengan pengalaman yang dimiliki, seorang karyawan juga sudah mempunyai ketrampilan dan tahu cara yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya dan kemampuan seseorang ditentukan oleh kualifikasi yang dimilikinya, antara lain oleh pendidikan, pengalaman dan sifat – sifat pribadi (Nanang Herry Triwibowo, 2006)

2.1.5 Peran Wanita

Secara umum wanita memiliki tiga fungsi utama yang sangat berkaitan dengan kedudukan dan peran wanita yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan fungsi produksi. Fungsi reproduksi sering, dihubungkan dengan hak dan kewajiban sekaligus sebagai simbol kelebihan dan kelemahan wanita. Fungsi sosialisasi berkaitan erat dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan anak-anaknya masuk ke dalam pergaulan masyarakat luas, dimana pengasuhan dan pendidikan boleh dilakukan oleh orang lain tetapi tanggung jawabnya tetap terletak pada seorang ibu. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi ekonomis wanita/ibu, sejalan dengan kemajuan jaman peningkatan kesempatan dan pendidikan memungkinkan wanita/ibu tidak saja berperan ekonomis secara tidak langsung tetapi dapat langsung menerima hasil baik berupa

uang ataupun barang sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaan ekonomi.

Konsep peran ganda, ditunjukkan oleh gejala meningkatnya jumlah wanita bekerja pada dekade delapan puluhan sampai sekarang, dimana selain bekerja seorang wanita tetap mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya dan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Berbagai macam motivasi dapat melatarbelakangi wanita/ibu untuk kerja, seperti pendidikan yang dimiliki, terdesak oleh kondisi ekonomi rumah tangga atau pun peluang atau waktu ibu yang luang yang dapat dipergunakan untuk bekerja. Waktu luang ibu sebagai akibat keberhasilan program KB nasional, dimana wanita/ibu dapat mengatur atau bahkan memutuskan untuk memiliki anak dalam jumlah sedikit yang dilatarbelakangi oleh perhitungan *opportunity cost* dalam hal memiliki anak banyak atau sedikit. Apabila dirasakan lebih menguntungkan memiliki anak sedikit maka seorang ibu akan memutuskan mempunyai keluarga kecil dengan anak sedikit sehingga ada waktu untuk dirinya dan melakukan pekerjaan ekonomis disamping mengurus rumah tangga (Todaro&Smith, 2006).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang peranan wanita dalam menunjang ekonomi rumah tangganya, khususnya para wanita yang memiliki pendapatan dari hasil bekerja beserta permasalahannya telah dilakukan oleh Fakhrudin (1996); Mamik Indaryani (1996); Sri Hartati (2000); Satrio Adi Setiawan (2010). Studi tersebut dapat dipakai sebagai rujukan yang sangat relevan bagi penelitian ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul dan Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	
1.	Fakhrudin (1996) Judul “Wanita Bekerja dan Peranannya Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Wanita Pekerja di Perusahaan Plywood Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Tingkat II Bengkalis)”	Dependen: Partisipasi Ekonomi Wanita di Sektor Publik Independen: Tempat Tinggal, Umur, Pendidikan, Status Perkawinan, Pekerjaan, Masa Kerja, Daerah Asal, Motivasi Kerja	Analisis Deskriptif	Dala wan kece pem istri Stu wan plyv pene
2.	Mamik Indaryani (1996) Judul “Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah)”	Dependen: Kemiskinan Independen: Peran Wanita, Ekonomi Rumah Tangga, Rumah Tangga	Analisis Deskriptif	a) P cuku mau dan cont lebi dirin b) D peny ibu depa beka c) U ekon kesu digu men pem d) S istri digu

				peke ditu digu peke men den untu rum kete istri yang peke e) D para peke terh ditu yang rum peke
3.	Sri Hartati (2000) Judul “Kondisi Buruh Perempuan yang Bekerja Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Tentang Buruh Perempuan yang Bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu”	Dependen: Kondisi Buruh Wanita Independen: Lingkungan Kerja, Lingkungan Rumah Tangga	Analisis Deskriptif	War pen men men misi belu mes di In disk tetap men renc
4.	Satrio Adi Setiawan (2010) Judul “Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja Dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Magelang	Dependen: Lama Mencari Kerja Independen: Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin	Analisis Regresi Berganda	Has dala bah selu terh tena sign ters 0,05 digu

				men bah pen jeni berp kerj

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dengan status wanita sebagai kepala rumah tangga di kebanyakan negara berkembang, maka wanita memiliki peranan penting dalam menunjang ekonomi rumah tangganya. Salah satu peranan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan pendapatan wanita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

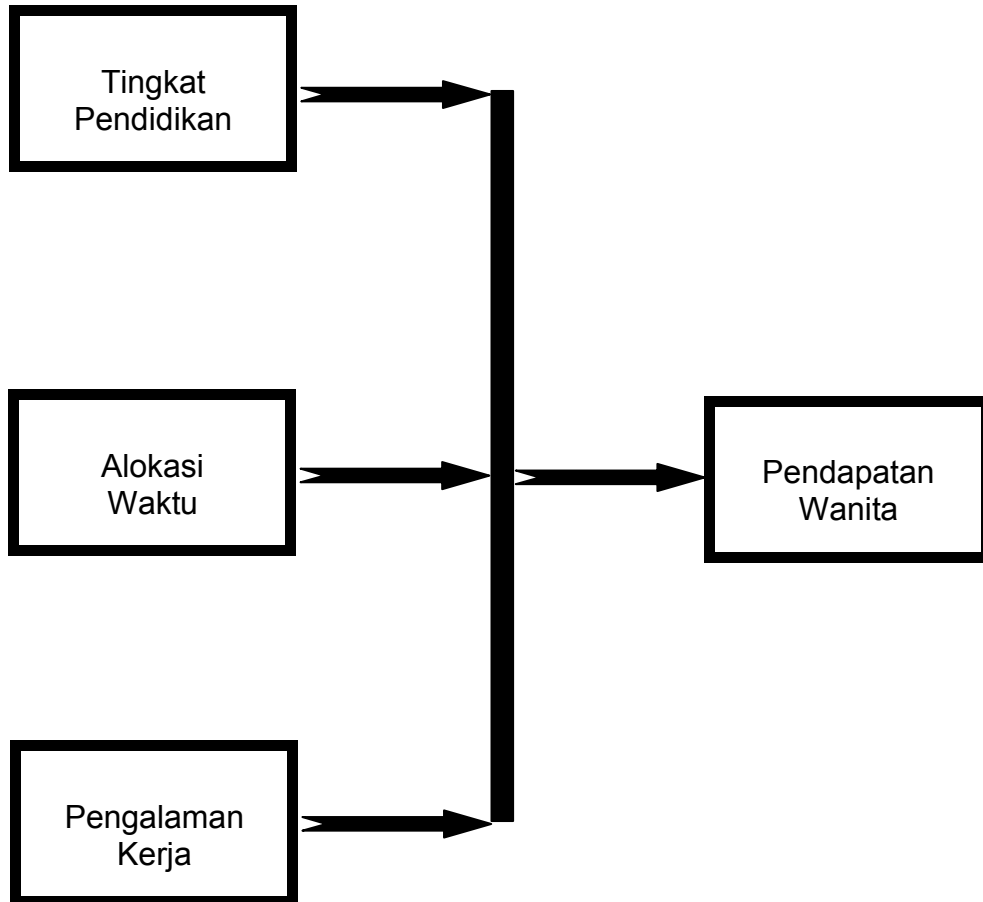
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pendapatan wanita di Kecamatan Kaliwungu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan wanita, alokasi waktu kerja wanita, dan pengalaman kerja wanita. Variabel tersebut sebagai variabel independen dan bersama-sama dengan variabel dependen yaitu pendapatan wanita diukur dengan alat analisis regresi berganda untuk mendapatkan signifikansinya. Untuk memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan wanita dalam peranannya menunjang ekonomi rumah tangga dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

2.4 Hipotesis

Dari permasalahan dan teori yang ada maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga tingkat pendidikan wanita berpengaruh secara positif terhadap pendapatan wanita.
2. Diduga alokasi waktu kerja wanita berpengaruh secara positif terhadap pendapatan wanita.
3. Diduga pengalaman kerja wanita berpengaruh secara positif terhadap pendapatan wanita.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

4. Keluarga miskin yaitu : keluarga-keluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus) adalah “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I”. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi beberapa indikator, yaitu setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing-masing, pada umumnya masing-masing anggota keluarga makan dalam sehari sebanyak dua kali atau lebih, semua anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda-beda untuk sekolah, bekerja, atau bepergian, bagian terluas lantai di rumah terbuat dari keramik atau tegel dan bukan dari tanah, serta yang terakhir adalah apabila anggota keluarga ada yang sakit atau ada pasangan usia muda yang ingin mengikuti Program KB, maka mereka akan datang ke petugas kesehatan dan diberi cara KB yang modern. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi salah satu kriteria di atas. Satuan yang digunakan untuk kategori keluarga miskin dalam penelitian ini adalah unit keluarga.
5. Pendapatan wanita yaitu penghasilan atau penerimaan yang diterima responden berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan dan diasumsikan apabila wanita memiliki pendapatan maka pendapatan keluarga juga akan ikut meningkat.

Untuk variabel pendapatan wanita ini diukur dalam ratusan ribu rupiah.

6. Tingkat pendidikan wanita yaitu proses seorang wanita untuk menuntut ilmu sesuai jenjang atau tingkat tertentu. Jenjang tersebut meliputi Tingkat rendah (Sekolah Dasar); Tingkat sedang (Sekolah Menengah Pertama sampai SLTA); dan yang terakhir adalah Akademi atau Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam kategori Tingkat Tinggi (pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Nasional). Untuk tingkat pendidikan, satuan yang digunakan adalah dengan penggunaan satuan tahun yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Nasional, yaitu:

6 tahun = Sekolah Dasar

9 tahun = Sekolah Menengah Pertama

12 tahun = Sekolah Menengah Atas atau sederajat

16 tahun = Perguruan Tinggi

7. Alokasi jam kerja wanita yaitu pemilahan waktu berapa jam per minggu dimana seorang wanita bersedia membagi waktunya dalam sehari untuk mengerjakan kegiatan rumah tangga atau melakukan kegiatan diluar urusan rumah tangga yang bersifat ekonomis. Waktu kerja full time adalah 35 jam per minggu sebagai acuan dan satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jam.
8. Pengalaman kerja wanita yaitu berapa lama jumlah tahun yang telah dilewati responden untuk bekerja. Ukuran yang digunakan adalah satuan tahun.

3.2. Populasi dan Sampel

Pemilihan daerah penelitian adalah daerah miskin yang mendasarkan pada data dari BPS. Berdasarkan data dari BPS tersebut, dipilih klasifikasi kemiskinan berdasarkan pengertian kemiskinan dari BKKBN yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Dua klasifikasi ini diambil untuk salah satunya dijadikan sebagai dasar pengambilan sampel.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selain berdasarkan data dari BPS dan informasi dari BKKBN juga dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kendal, Khususnya Kecamatan Kaliwungu berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, tetapi diantara kedua kabupaten tersebut sangatlah terlihat jelas adanya disparitas padahal di Kecamatan Kaliwungu sendiri pun terdapat beberapa industri besar seperti PT. Samator Gas dan PT. Texmaco yang menyerap tenaga kerja cukup banyak terutama buruh wanita yang logikanya dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut seharusnya ketimpangan yang terjadi tidak begitu signifikan.

Untuk pengambilan sampel, teknik yang dilakukan adalah metode quota purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi (Tatang M. Amirin, 2009). Ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tersebut mengacu pada definisi keluarga menurut tahapan kesejahteraan dari BKKBN yaitu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap pertama.

Pengambilan responden diambil berdasarkan pendapat Irawan Soehartono (Hanni Rizki Febriana, 2011) sehingga ditentukan jumlah responden dengan pilihan sampel besar minimal sebanyak 50 responden dan dipilih karena populasi relatif homogen. Untuk mendapat informasi dari responden maka kuesioner disebar ke responden di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Distribusi Sampel

No.	Desa	Jumlah Responden (kk)
1	Kumpulrejo	6
2	Karangtengah	6
3	Sarirejo	6
4	Krajan Kulon	5
5	Kutoharjo	5
6	Nolokerto	6
7	Sumberejo	6
8	Mororejo	5
9	Wonorejo	5
Total		50

3.3. Jenis dan Sumber Data

Menurut J. Supartono (2000) dalam penelitian Satrio Adi Setiwan (2010) yang berjudul Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi tenaga Terdidik di Kota Magelang mengatakan bahwa data merupakan gambaran tentang keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan dasar dari suatu pengambilan keputusan. Data berperan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi yang jelas kemudian dianalisis menghasilkan output untuk penentuan rencana lebih lanjut.

Data primer yang diperlukan ini diperoleh melalui wawancara langsung

dengan kuesioner yang ditanyakan kepada responden (sesuai dengan pengertian kemiskinan dari BKKBN) di Kecamatan Kaliwungu. Data primer yang akan dikumpulkan meliputi data tentang pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan wanita, alokasi waktu bekerja wanita, dan pengalaman kerja wanita.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah serta referensi dari internet dan buku yang mendukung isi penelitian. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data tentang kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan serta kumpulan data statistik terkait yang lainnya. Untuk lebih melengkapi pemaparan hasil penelitian, digunakan dan referensi lainnya yang relevan, misalnya dari laporan penelitian, jurnal, dan publikasi terkait lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Moch. Nazir (1998) dalam penelitian Satrio Adi Setiwan (2010) yang berjudul Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi tenaga Terdidik di Kota Magelang, dalam penelitian biasanya dipergunakan beberapa macam pengumpulan data. Metode pengumpulan data disesuaikan dengan pokok permasalahan yang sedang di teliti, situasi dan kondisi serta keakuratan yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan Metode *Interview* dan *Library Research*.

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya

dengan responden dengan menyiapkan serangkaian daftar pertanyaan (kuesioner) mendetail dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya dan proses interview tersebut harus mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan secara ketat, sehingga didapatkan responden yang dapat mewakili tujuan penelitian.

Metode lain adalah Metode Library Research, yaitu Cara pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif melalui sumber-sumber seperti jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah, dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.5 Metode Analisis

Metode Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu Software SPSS 13.0 for Windows.

3.5.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu tenaga kerja wanita, tingkat pendidikan, alokasi waktu bekerja, terhadap pendapatan wanita sebagai variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini dituliskan dalam fungsi Cobb Douglas sebagai berikut:

$$Y = a \cdot X_1^{b_1} \cdot X_2^{b_2} \cdot X_3^{b_3} \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana:

Y = pendapatan wanita

x1 = pendidikan wanita

x2 = alokasi jam kerja wanita

x3 = pengalaman kerja wanita

Persamaan (3.1) dimasukkan ke dalam bentuk Log, sehingga menjadi :

$$\text{Log } Y = a + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + b_3 \log X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (3.2)$$

Alasan penggunaan log ini dikarenakan :

- (1) untuk mencegah heteroskedastisitas karena mendekatkan skala data
- (2) koefisien dapat langsung dapat dibaca sebagai elastisitas

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) dalam penelitian Satrio Adi Setiawan (2010), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- b) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- c) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini uji normalitas secara statistik juga menggunakan alat analisis *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai sig (2-tailed) $> 0,05$; maka distribusi data normal.
- b) Jika nilai sig (2-tailed) $< 0,05$; maka distribusi data tidak normal.

Cara lain untuk uji normalitas, seperti yang dikatakan Santoso (2000) dalam penelitian Adrian Setyadharma (2010), adalah dengan melihat rasio skewness dan rasio kurtosis. Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standar error skewness, sedangkan rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada antara -2 hingga +2 maka distribusi data adalah normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Seperti yang dikatakan Algifari (2000) dalam penelitian Adrian Setyadharma (2010), penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas adalah antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati

sempurna. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*).

Menurut Ghozali (2006) dalam penelitian Satrio Adi Setiawan (2010), terdapat beberapa cara untuk menemukan hubungan antara variabel X yang satu dengan variabel X yang lainnya (terjadinya multikolinearitas), adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki korelasi antar variabel bebas yang sempurna (lebih dari 0,9), maka terjadi problem multikolinearitas.
- b) Memiliki nilai VIF lebih dari 10 (> 10) dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 ($< 0,10$), maka model terjadi problem multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006) dalam penelitian Satrio Adi Setiawan (2010), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Dasar analisis terjadi Heteroskedastisitas adalah :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara lain pengujian heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode Uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut:

$$|e| = b_1 + b_2X_2 + v$$

Dimana:

$|e|$ = Nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model
 x_2 = variabel penjelas

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka model ini dipastikan memiliki masalah heteroskedastisitas.

3.5.3 Pengujian Statistik (Goodness of Fit)

Imam Ghozali (2005) dalam penelitian Ardhian Setyadharma (2010) menyatakan bahwa setelah model bebas dari pengujian asumsi klasik, dilanjutkan dengan justifikasi statistik. Justifikasi statistik merupakan uji giving goodness of fit model yang menyangkut ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dengan melihat dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2005) dalam penelitian Adrian Setyadharma (2010), koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.5.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Imam Ghozali (2005) dalam penelitian Ardhian Setyadharma (2010), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan cara sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$, variabel bebas memiliki pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen.

$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen.

b) Menentukan derajat kepercayaan yaitu sebesar 0.05 ($\alpha=0,05$)

c) Membandingkan F hitung dengan F tabel :

- Bila F hitung $<$ F tabel, variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (menolak H_0).

- Bila F hitung $>$ F tabel, variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (menerima H_0).

3.5.3.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Imam Ghozali (2005) dalam penelitian Ardhian Setyadharma (2010), uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan hipotesis

Ho: $b_i \leq 0$, variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen.

Ha: $b_i > 0$, variabel bebas memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen.

- b) Menentukan derajat kepercayaan (α) sebesar 0,05.

- c) Membandingkan t hitung dengan t tabel:

- Ho diterima jika t hitung (1-tailed) < t tabel dan sebaliknya

- Ha diterima jika t hitung (1-tailed) > t tabel dan sebaliknya